

# **KEEFEKTIFAN PEMBINAAN WARGA BINAAN KASUS PEMBUNUHAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA**

**NUR NASHRI RAHMAN**  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Makassar  
[nashricasper@gmail.com](mailto:nashricasper@gmail.com)

## **ABSTRAK**

**NUR NASHRI RAHMAN.** 2019 Keefektifan Pembinaan Warga Binaan Kasus Pembunuhan Di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh Irsyad Dahri dan Heri Tahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. 2) Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi itu kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dapat dikatakan efektif, dengan bentuk pembinaan yaitu : (1) Pembinaan keterampilan yang terdiri dari; Menjahit, salon, kerajinan tangan, berkebun, dan tata boga. (2) Pembinaan kerohanian yaitu Pesantren An-nisa. (3) Pembinaan jasmani yaitu senam pagi. 2) Hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan terbagi dua yaitu : (1) Hambatan Internal yang terdiri dari sarana dan prasarana yang perlu di tambah, sumber daya manusia yang perlu ditambah jumlahnya dan ditingkatkan kemampuannya, dan warga binaan itu sendiri yang perlu ditingkatkan kesadarannya. (2) Hambatan eksternal yakni letak Lapas Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa yang di rasa pihak luar cukup jauh baik di keluhkan oleh keluarga warga binaan, maupun pihak luar lainnya yang bekerjasama dengan Lapas Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam setiap kegiatannya.

Kata Kunci : Pembinaan, Pembunuhan, Lapas

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu.

Indonesia sebagai Negara hukum, hal ini tercermin pada UUD tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum. Hukum adalah gabungan dari peraturan-peraturan yang hidup dan bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah tahanan negara (Rutan) merupakan muara dari suatu sistem peradilan pidana di Indonesia, yang memiliki kewenangan serta tugas dari negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada narapidana. Pembinaan yang diberikan harus sesuai dengan proporsi dan aturan yang telah ditetapkan namun terkadang pembinaan ini tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh petugas karena keterbatasan jumlah petugas dan banyaknya jumlah penghuni yang over

kapasitas, sehingga hasil dari pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap warga binaannya. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan<sup>2</sup>. Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut merupakan sebagian dari masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang dilakukannya. Namun, Warga Binaan tersebut tidak akan pernah terlepas dari peran sertanya dalam terwujudnya tujuan pembangunan suatu bangsa. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membentuk warga binaannya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga dalam sikap menerima kembali warga binaan yang kelak berbaur kembali bersama mereka. Selain itu peranan Petugas Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan itu dilakukan. Upaya untuk mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 1.

Banyak para Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan berbagai kasus seperti penipuan, pencurian, pencucian uang, penjualan manusia, korupsi, dan narkoba, bahkan pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan itu menyebabkan mereka menguni Lembaga Pemasyarakatan. Pelaku tindak pidana sering kali kita temui adalah laki-laki dewasa namun bukan berarti tidak pidana tidak dilakukan oleh perempuan, saat sekarang ini banyak kejahatan justru dilakukan oleh perempuan. Dengan bermacam-macam kasus dan berbagai motif kejahatan. Salah satunya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan yang mungkin sering terdengar oleh kita masyarakat Indonesia.

Tujuan dari Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar warga binaan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari warga binaan itu sendiri. Tujuannya agar warga binaan mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Tujuan pembinaan di lapas sangat berkaitan erat dengan tujuan pemasyarakatan. Namun sangat disayangkan bahwa pembinaan yang dilakukan terkadang masih belum optimal.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan/narapidana merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LAPAS Perempuan). Sistem keamanan sebagai

langkah awal dari pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan/narapidana harus berjalan seimbang, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Apabila semua proses tersebut sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan

benar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka akan tercipta ketertiban dan keharmonisan terhadap seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi narapidana, tahanan, anak didik pemasyarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penyelenggaraan pembinaan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya Warga Binaan Pemasyarakatan/narapidana siap untuk dikembalikan kepada masyarakat dan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan.

Dengan latar belakang inilah, maka peneliti akan melakukan kajian atau penelitian dengan judul **“Keefektifan Pembinaan Warga Binaan Kasus Pembunuhan Di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan.

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  - b. Untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Pihak lembaga pemasyarakatan (Kelas II A Sungguminasa, Kabupaten Gowa)

Dengan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.
  - b. Warga binaan

Sebagai bahan rujukan bagaimana selama ini keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.
  - c. Masyarakat

Kiranya dapat menjadi gambaran tentang keefektifan

pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

d. Bagi peneliti

Untuk menambah ilmu, pengetahuan, informasi serta wawasan tentang keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

### PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

#### A. TINJAUAN PUSTAKA

##### 1. Konsep Keefektifan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut H. Emerson bahwa “Keefektifan adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya<sup>4</sup>.” Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat di atas mengenai keefektifan, dapat disimpulkan bahwa keefektifan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan keefektifan, sebagai berikut: “Keefektifan merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan)

<sup>4</sup> Soewarno Handyaningrat S. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen* 1994 hal 16

<sup>5</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Surabaya: Amelita Surabaya, 2003), hal 129

*output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”<sup>6</sup>. Keefektifan berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka keefektifan adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian keefektifan yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Menurut Sedarmayanti efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Selain itu ukuran keefektifan untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu:

- 1) Input,
- 2) Proses,
- 3) Hasil,<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran dari pada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output (hasil yang diperoleh), ukuran pada efektifitas mesti adanya hasil yang maksimal yang di peroleh dari tingkat kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi.

## **2. Tinjauan Tentang Pembinaan**

### **a. Pengertian Pembinaan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Sedangkan dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasyarakatan.<sup>8</sup>

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan (narapidana, anak didik, anak negara dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaan dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan petugas Lapas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Sasaran utama pembinaan narapidana itu ialah mempersiapkan agar narapidana tersebut mampu menghadapi masa depan serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dimasyarakat.<sup>9</sup>

### **b. Ruang Lingkup Pembinaan**

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ tahanan dibagi dalam dua (2) bidang yaitu:

- Pembinaan Keperibadian

- 1) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat dipergunakan untuk meneguhkan iman terutama memberi pengertian agar warga binaan Lapas dapat menyadari akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Upaya ini dilakukan melalui pendidikan

---

<sup>6</sup> Mahmudi Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2005 hal 92.

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja* (Cet. Ketiga; Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 59-60

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan* pasal 1 ayat (1).

<sup>9</sup> Disman Samosir, 1992. *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia* Cetakan e- 1, Bandung , hal. 82

Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti untuk bangsa dan negara.

3) Pembinaan kemampuan (Intelektual)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan permasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan intelektual (kecerdasan) dilakukan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan formal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan LAPAS. Pendidikan nonformal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan, latihan keterampilan dan sebagainya.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Kesadaran hukum yang dibina selama berada dalam LAPAS maupun setelah kembali ditengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan secara langsung dengan cara ceramah, diskusi, temu wicara, peragaan dan simulasi hukum.

5) Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat

Pembinaan dengan cara ini dapat juga dikatakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima

kembali ditengah-tengah masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai sasaran ini kepada narapidana diberikan (selama berada di LAPAS) pembinaan terus untuk patut beribadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial secara gotong royong sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat telah memiliki sifar-sifat positif untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya.

- Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan dalam LAPAS melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. Misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, alat-alat elektronik.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga).
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu.<sup>10</sup>

Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 PP RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan mengenai kegiatan pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu kegiatan kerohanian, jasmani, pendidikan

---

<sup>10</sup> Muh.Chaerul R, 2014. *Keefektifan Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lembaga*

dan pengajaran.<sup>11</sup>

### c. Tahap-Tahap Pembinaan

Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) PP RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 tahap, yaitu:

- Tahap awal
- Tahap lanjutan
- Tahap akhir

Pembinaan tahap awal pada pasal 9 ayat (1) yang menyatakan pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa tahanan. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) yang menyatakan pembinaan tahap awal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan.
- b) Merencanakan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pada pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana.
- b) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.

Dalam pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan

sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Sedangkan pasal 10 ayat (3) yang menyatakan pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi.
- b) Pelaksanaan program integrasi.
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.<sup>12</sup>

### d. Prinsip-prinsip Pembinaan

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

- 1) Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksamelainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 5, pasal 6, pasal 7.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 7 ayat (1),(2),(3) pasal 9 ayat (1),(2),(3), pasal 10 ayat (1),(2),(3).

hilang kemerdekaan.

- 10) Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>13</sup>

### **3. Pengertian Warga Binaan, dan Hak Warga Binaan**

#### **a. Pengertian Warga Binaan**

Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. warga binaan pemasyarakatan adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan.

Pengertian warga binaan pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Dengan demikian pengertian warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan, hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. warga binaan pemasyarakatan secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.<sup>14</sup>

#### **b. Hak Warga Binaan**

Harus diketahui, warga binaan pemasyarakatan sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-

hak asasinya sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani warga binaan pemasyarakatan itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagaimanusia. Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat.

Sebagai negara hukum hak-hak warga binaan pemasyarakatan itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. warga binaan pemasyarakatan juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi warga binaan pemasyarakatan, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 secara tegas menyatakan warga binaan pemasyarakatan berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Cetakan ke-3 3. Bandung, hal.98-99

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/warga\\_binaan\\_pemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/warga_binaan_pemasyarakatan) diakses pada 16 Januari 2019, (08.00 Wita).



- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.<sup>15</sup>

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Khusus untuk Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999

tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.<sup>16</sup>

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**

##### **a. Pengertian Pemasyarakatan**

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>17</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.<sup>18</sup>

Pemasyarakatan juga adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilihan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakkan hukum.<sup>19</sup>

##### **b. Sistem Pemasyarakatan**

Berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila

<sup>15</sup>Diah Gustiani., Rini Fathonah & Dona Raisa, Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi Dan PeraturanPerundang – Undangan Fakultas hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 61.

<sup>16</sup> <http://lapas-ciamis.blogspot.co.id/> diakses pada 16 Januari 2019, (12.24 Wita).

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* pasal 1 ayat (1).

<sup>18</sup> Nasrhriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Cetakan ke- 2. Depok, hal.153

<sup>19</sup> Dwidja P. op. cit. hal.109

yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian di atas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.

Dengan mendasarkan kepada Falsafat Negara, diharapkan pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila dari Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara Pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina. Apabila warga yang dibina nantinya dapat memperbaiki dirinya, tentu mereka akan diterima kembali ke masyarakat, tanpa perlu ada kecurigaan lagi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hubungan mantan narapidana dengan masyarakat diharapkan dapat pulih kembali seperti sediakala.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan itu, pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar

menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakkan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>22</sup>

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

### **c. Lembaga Pemasyarakatan**

Secara umum, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga adalah suatu badan hukum yang menjadi wada/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 12 Tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (2).

<sup>21</sup> Nasrhiana. op. cit. hal. 154

<sup>22</sup> Dwidja P. op. cit. hal. 103

pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat proses resosialisasi narapidana tersebut.<sup>23</sup> Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Dahulu, Lembaga Pemasyarakatan disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi LAPAS. Perubahan nama penjara menjadi lapas tidak dapat dilepaskan dari gagasan Suhardjo menjadikan lapas tidak saja sebagai tempat memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik terpidana agar setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Kegiatan Pembinaan di lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud dan kegiatan. Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan :

- 1) Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- 2) Bimbingan sosial, yang diselenggarakan

dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integritas dengan masyarakat.

- 3) Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.
- 4) Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajarmenaati aturan.
- 5) Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luar.<sup>25</sup>

Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a) Menurut Usia
  - Lembaga Pemasyarakatan untuk anak
  - Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda
  - Lembaga pemasyarakatan untuk dewasa
- b) Menurut jenis kelamin
  - Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita
  - Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki
- c) Menurut kapasitasnya
  - Lembaga Pemasyarakatan kelas I
  - Lembaga Pemasyarakatan kelas II
  - Lembaga Pemasyarakatan kelas III

#### **d. Dasar hukum lembaga pemasyarakatan**

Lemabaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas

<sup>23</sup> Disman S. op.cit. hal. 106

<sup>24</sup> Ruslan R, *Hukum acara pidana (memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)*. Hal. 226-227.

<sup>25</sup> Ibid.hal. 229

berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta dapat pula berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan maupun kebijakan lainnya. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 8) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- 9) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- 10) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-02-Pk.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
- 11) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.Pk.07.02 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

#### **e. Asas-asas Pembinaan Pemasyarakatan**

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para Pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan pasal 2 UU Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan melingkupi :

#### **1) Asas pengayoman**

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya. Jadi asas ini dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hokum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termasuk pula pengayoman terhadap para narapidana selama mereka menjalani pidananya di LAPAS, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi, LAPAS bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.

#### **2) Asas Persamaan dan Pelayanan**

Asas ini dimaksudkan agar terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat persamaan perlakuan dan pelayanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orang. Karena itu, dalam melakukan pembinaan tidak boleh membedakan narapidana yang berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya.

#### **3) Asas Pendidikan**

Di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan antar sesama warga binaan pemasyarakatan dan antara warga binaan dengan Pembina atau pejabat/pegawai LAPAS; sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik laksana hidup dalam sebuah keluarga. Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan member kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik. Dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama

yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Tuhan, berobat atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.

#### 4) Asas Pembimbingan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pembimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Dengan dilakukan pendidikan dan pembimbingan keterampilan, diharapkan untuk menghilangkan rasa jenuh hidup dalam LAPAS yang tujuan pokoknya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada narapidana supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan, sehingga setelah selesai menjalani pidananya, mereka tidak akan menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

#### 5) Asas penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana layaknya seorang manusia. Meskipun seorang narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan sebesar dan seberat apa pun, mereka tetap manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya. Apabila tidak dilakukan demikian, maka itu berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

#### 6) Asas kehilangan kemerdekaan

Merupakan Satu-satunya Penderitaan Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu yang telah ditentukan melalui putusan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk member kesempatan kepada negara untuk memperbaiki, melalui pendidikan dan pembinaan. Seseorang yang dihukum pidana penjara atau kurungan harus menjalani pidananya di LAPAS, selama dalam LAPAS inilah mereka menjadi hilang kemerdekaannya. Artinya ia tidak bebas untuk berpergian ke mana pun atau melakukan aktivitas di luar. Hilangnya kebebasan untuk melakukan kegiatan diluar tersebut sebagai satu-satunya penderitaan yang dialami selama menjadi

penghuni dalam LAPAS, walaupun selama dalam LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap mempunyai hak-hak lainnya sebagai layaknya manusia.

#### 7) Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selama narapidana mendapat pembinaan di LAPAS, mereka tetap dijamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu. Pada prinsipnya, untuk melakukan pembinaan, narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dengan masyarakat. Mereka tetap dapat berhubungan dengan keluarganya. Mereka dibolehkan menemui dan berbicara dengan keluarga yang datang berkunjung ke LAPAS. Kunjungan keluarga ini diharapkan dapat member semangat bagi mereka untuk hidup sementara di LAPAS, dan mereka merasa tidak ditinggalkan oleh keluarganya. Selain itu warga binaan juga diperbolehkan berhubungan dengan orang lain yang bukan keluarganya, seperti pejabat yang berkunjung ke LAPAS, rohaniawan, atau seniman.<sup>26</sup>

### 5. Kasus Pembunuhan

Peristiwa yang dengan alasan tertentu dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku adalah disebut sebagai suatu pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>27</sup> Berdasarkan uraian diatas,

<sup>26</sup> Nasrhrina. op. cit. hal.155-158

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN**

#### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu pengujian secara rinci terhadap, suatu latar, subyek, satu tempat penyimpanan, atau satu peristiwa tertentu. Pada penelitian ini menitik beratkan pada keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

#### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

### **B. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Timbuseng Jl. Lembaga, Jl. Poros Bollangi, Sungguminasa, Patal 33, Kabupaten Gowa merupakan salah satu unit pelaksana teknis permasyarakatan di wilayah kerja kantor wilayah kementerian hukum dan ham Sulawesi selatan.

### **C. DESKRIPSI FOKUS**

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap variabel yang diteliti atau tidak menimbulkan kerancuan, maka variabel dikemukakan secara operasional.

1. Keefektifan yang maksud oleh peneliti adalah seberapa jauh hasil yang di capai dari proses pembinaan yang dilakukan, yang mana semakin baik hasil yang di

peroleh maka akan dikatakan semakin efektif.

2. Pembinaan keterampilan yang maksud adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas warga binaan dalam hal: menjahit, salon, kerajinan tangan, berkebun dan tata boga. Pembinaan jasmani yang maksud adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas warga binaan dalam hal kesehatan jasmani yaitu : senam pagi. Pembinaan kerohanian yang maksud adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas warga binaan dalam hal ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu : pesantren lapas an-nisa dan ibadah kristen.
3. Kasus pembunuhan yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang di lakukan oleh seseorang atau lebih untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum dengan alasan tertentu atau latarbelakang tertentu.

### **D. TAHAP – TAHAP KEGIATAN PENELITIAN**

#### **1. Tahap perencanaan**

Tahap perencanaan merupakan tahap yang pertama dilakukan oleh peneliti.

- a. Mengidentifikasi masalah, mencari masalah.
- b. Merumuskan masalah yang akan diteliti.
- c. Mengadakan studi pendahuluan
- d. Menyusun rencana penelitian

#### **2. Tahap pelaksanaan penelitian**

- a. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
- b. Analisa data dilakukan setelah data terkumpul.

#### **3. Laporan Hasil Penelitian**

Pada tahap ini penelitian akan dilaporkan berupa skripsi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian.

### **E. SUMBER DATA**

Jenis data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang

dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus peneliti yang diteliti, yaitu keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

1. Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang di peroleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini diambil dari data tertulis, rekaman, atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data ini melalui wawancara dan pengamatan serta merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengar dan bertanya.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku – buku ilmiah, internet, hasil penelitian atau makalah yang merupakan pendukung data primer.

Dari pengertian diatas, maka penulis dapat menuliskan bahwa yang termasuk dalam populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh warga binaan perempuan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. Warga binaan perempuan yang ada di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, berjumlah 5 orang oleh karena itu maka tidak perlu dilakukan penarikan sample karena seluruh populasi yang ada merupakan sampel penelitian.

#### **F. INSTRUMEN PENELITIAN**

Instrument penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrument penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang berupa, catatan harian dan data di lapangan, daftar pertanyaan, dan dokumentasi.

#### **G. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Kegiatan obeservasi pada penelitian ini berupa pengisian instrument pengamatan terhadap keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada KaLapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan, Kepala Aub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban serta bagian-bagian yang penting terkait pembinaan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, guna memperoleh informasi perihal keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung sesuai dengan instrument wawancara yang telah dirancang sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi disini merupakan pengumpulan data berupa fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini, seperti data jumlah warga binaan, keadaan lapas kelas II A dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **H. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA**

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Untuk memenuhi keabsahan temuan mengenai keefektifan pembinaan warga binaan

kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Perpanjangan keikutsertaan pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyi oleh narasumber karena sudah timbul rasa kepercayaan terhadap peneliti. Dan untuk mengecek kesesuaian dengan data yang diperoleh.
- b. Ketekunan pengamat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal – hal tersebut secara rinci.
- c. Triangulasi, maksudnya data yang diperoleh dibandingkan, diuji dan diseleksi keabsahannya

## **I. ANALISIS DATA**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana melalui analisis ini, peneliti mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena – fenomena yang terjadi serta menyajikan apa adanya sesuai kondisi dan keadaannya yang berkenaan dengan keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

- a. **Riwayat Singkat Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa**

Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Lembaga – Bollangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa yang menempati lahan seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  dengan Luas Bangunan secara keseluruhan  $\pm 14.000 \text{ m}^2$ .

Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa mulai dibangun pada Tahun 2004 dan mulai dioperasikan sejak 5 September 2007 serta diresmikan pada tanggal 26 Juli 2011 oleh Bapak Patrialis Akbar, S.H., Menteri Hukum dan HAM RI.

Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah unit pelaksana teknis di bidang Masyarakat Khusus Wanita yang berfungsi untuk melakukan Pembinaan dan Perawatan Khusus bagi Warga Binaan Masyarakat Wanita.

Dalam melaksanakan tugasnya Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Pembinaan / Anak Didik Wanita.
  2. Memberikan bimbingan sosial / kerohanian pada Narapidana / Anak Didik Wanita.
  3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
  4. Melakukan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga
- b. **Tugas Pokok Dan Fungsi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.**

Lembaga Masyarakat (LAPAS) sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995



tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan menganut asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Sebagaimana tercantum dalam undang – undang No.12 tahun 1995 pasal 8 ayat 1 tentang Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang mempunyai Tugas dan Fungsi di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan.

**c. Visi dan Misi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.**

**VISI**

Terwujudnya lembaga pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan,PRIMA dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.

**MISI**

Melaksanakan perawatan,pembinaan WBP dalam kerangka penegakan hukum,pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

**MOTTO**

**BERIMAN** (Bersih,Religius,Indah dan Mandiri).

**2. Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Kasus Pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.**

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Warga binaan bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana. Maka sudah sepantasnya apabila Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk lebih jelasnya akan kita lihat hasil penelitian dilakukan yang berkaitan dengan proses pembinaan dan apa saja hambatan yang di hadapi dalam proses pembinaan oleh Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Pada Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa tercatat ada sebanyak, 241 Warga Binaan dari berbagai kasus yang ada. Adapun untuk rinciannya sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum tentang Undang-undang Pemasyarakatan yang

merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.<sup>28</sup>

Sementara pada penelitian ini menitikberatkan perhatian pada kasus pembunuhan yang mana jumlah warga binaannya saat ini sebanyak 5 orang. Berikut ini data warga binaan kasus perempuan.

Warga binaan yang ada Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa terkhusus untuk kasus pembunuhan berangkat dari latar belakang kasus yang berbeda-beda dari tabel yang daftar warga binaan kasus pembunuhan.

Diketahui bahwa ada lima orang, dua orang melakukan pembunuhan dilatarbelakangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami yakni dari suami wargabinaan sehingga tega menghabisi nyawa suaminya tersebut. Selanjutnya juga ada yang alasan melakukan pembunuhan terhadap suaminya karena kasus perselingkuhan dimana suami warga binaan ini selingkuh dengan wanita lain sehingga memicu dendam dan tega membunuh suaminya. Kasus selanjutnya dilatarbelakangi karena hutang, jadi warga binaan ini berhutang kepada seseorang yang tidak bisa dibayar dan terus-menerus ditagih sehingga pada suatu ketika didatangi dan dipaksa membayar warga binaan ini tersulut emosi dan menikam menyebabkan hilangnya nyawa orang tersebut. Yang terakhir dikarenakan kasus pelecehan seksual, warga binaan ini hampir diperkosa oleh kepala sukunya yang menyebabkan keluarga warga binaan ini dendam dan membunuh kepala suku tersebut.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan (narapidana, anak didik, anak negara dan

tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaan dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan petugas lapas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan agar tujuan pembinaan dapat tercapai.

Sasaran utama pembinaan narapidana itu ialah mempersiapkan agar narapidana tersebut mampu menghadapi masa depan serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dimasyarakat.<sup>29</sup>

**a. Pembinaan Kemandirian dan keterampilan**

Bentuk pembinaan keterampilan yang diberikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa ini untuk mengembangkan kemampuan narapidana wanita sebagai berikut:

- **Menjahit**

Menjahit merupakan bentuk pembinaan keterampilan yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah, selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, bahwa :

“Kami sebagai petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa memberikan berbagai kegiatan dalam proses pembinaan warga binaan, harapannya bahwa mereka tidak hanya sebagai warga binaan yang keberadaanya di lapas untuk menjalani masa hukuman tetapi juga sebagai warga binaan yang memiliki keterampilan yang berguna untuk pribadi mereka setelah slesai menjalani masa hukumannya.”<sup>30</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Ramlah, selaku Kasubsi Sarana Kerja, menjelaskan bahwa :

“Pembinaan keterampilan ini yang berupa menjahit diberikan dalam bentuk pelatihan menjahit bagi warga binaan karena tujuannya memang untuk mengembangkan bakatnya dan

---

<sup>28</sup> Ibid. hal. 102

<sup>29</sup> Disman Samosir, 1992. *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia* , Cetakan ke- 1, Bandung , hal. 82

<sup>30</sup> Ibu Indah, Kasubsi Bimbingan Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

menjadi bekal jika warga binaan tersebut sudah bebas bisa mandiri di luar, karena sebelum mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan menjahit, warga binaan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk memilih kegiatan mana yang ingin diikuti sesuai kebutuhan dan kemampuannya, misal yang suka menjahit berarti mendapatkan pembinaan keterampilan menjahit, sedangkan yang suka tata rias atau make-up mendapat pembinaan keterampilan salon.”<sup>31</sup>

Di tambahkan oleh Ibu Nurmiati selaku Kasie Giatja, bahwa :

“Warga binaan yang ada di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, dalam proses pembinaannya baik keterampilan dan sebagainya itu diwajibkan untuk memilih satu diantara beberapa jenis pengembangan keterampilan sehingga tujuan kita dalam mewujudkan pembinaan warga binaan di lapas betul-betul berjalan, jadi mereka harus memilih apakah menjahit, salon, berkebun, kerajinan tangan dan tata boga. Tetapi kita juga tidak membatasi kalau ada yang mau lebih dari satu keterampilan yang di ikuti, bahkan kalau semuanya mau di ikuti juga lebih bagus lagi, ada beberapa warga binaan yang mengikuti empat kegiatan pada pengembangan keterampilan.”<sup>32</sup>

Sementara menurut salah satu warga binaan yakni, Nurfitriani, bahwa :

“Kami sebagai warga binaan sangat senang dengan adanya pembinaan keterampilan menjahit, karena dapat mengembangkan kemampuan yang sebelumnya saya tidak miliki, tapi setelah di beri keterampilan menjahit sekarang saya sudah bisa menjahit, dan membuat taplak meja sendiri, begitupun dengan teman-teman yang lain disini, ada juga yang sebelumnya sudah bisa menjahit jadi belajarnya tidak lama”.<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di

pahami bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan dalam bentuk menjahit.

#### • **Salon**

Salon merupakan bentuk pembinaan keterampilan yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah, selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, bahwa :

“Salon juga merupakan salah satu bentuk pembinaan keterampilan untuk warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, mereka diberi bekal kemampuan dalam hal bias memotong rambut, perawatan rambut seperti creambath, mewarnai rambut, dll, serta make-up, harapanya juga bahwa warga binaan yang ada di lapas memiliki aktifitas dan nilai lebih, dalam prosesnya di dalam lapas”.<sup>34</sup>

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Nurmiati selaku Kasie Giatja, bahwa :

“Untuk pembinaan keterampilan dalam hal salon kami memfasilitasi warga binaan sehingga bukan hanya untuk menambah kemampuan dan keterampilan warga binaan tetapi juga lebih kepada mereka sadar akan diri mereka tentang perawatan, sekalipun mereka adalah warga binaan, *kan mereka juga harus potong rambut masa 10 tahun, rambut tidak di potong*”.<sup>35</sup>

Selain itu menurut salah satu warga binaan yakni, Ruth Arni, bahwa :

“Kalau di salon memang kita mendapat pembekalan keterampilan tetapi kalau kita posisinya sebagai pelanggan maka kita harus membayar sebagai pemasukan untuk salon, agar bahan kebutuhan salon tetap

---

<sup>31</sup> Ibu Ramlah, Kasubsi Sarana Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

<sup>32</sup> Ibu Nurmiati, Kasie Giatja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

<sup>33</sup> Nurfitriani, warga binaan kasus pembunuhan wawancara pada hari Rabu, 10 April 2019

<sup>34</sup> Ibu Indah, Kasubsi Bimbingan Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

<sup>35</sup> Ibu Nurmiati, Kasie Giatja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

tersedia, misal potong rambut sepuluh ribu, make-up dua puluh ribu”.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan keterampilan salon kepada warga binaanya.

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan salon untuk warga binaan.

- **Kerajinan Tangan**

Membuat kerajinan tangan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan keterampilan yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Ibu Ramlah, selaku Kasubsi Sarana Kerja, bahwa :

“Khusus untuk keterampilan kerajinan tangan yang diberikan kepada warga binaan tidak ditentukan jadwal jamnya, tergantung dari mereka kapan sempat untuk membuat kerajinan tangan, misalkan ada yang sementara duduk di taman, atau di tempat ibadah, tergantung dari mereka, sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan keterampilan lainnya”.<sup>37</sup>

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Nurmiati selaku Kasie Giatja, bahwa :

“Kami memberikan pengembangan keterampilan kerajinan tangan kepada warga binaan, harapanya selain dari keterampilan lainnya yang mereka ikuti, dari kerajinan tangan itu mereka menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang hasilnya masuk di kantong pribadi mereka, dan tidak ada batasan berlaku untuk semua warga binaan”.<sup>38</sup>

Sementara itu menurut salah satu warga binaan Fransiska, bahwa :

“Saya membuat kerajinan tangan kalau ada waktu luang, seperti saat ini saya selesai berdoa di Gereja da nada waktu kosong jadi saya tinggal untuk membuat kerajinan tangan, *yaa sempat bisa jadi satu tas*”.<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan untuk warga binaan yaitu pembuatan kerajinan tangan.

- **Berkebun**

Pembinaan keterampilan berkebun menjadi salah satu keterampilan yang wajib yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah, selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, bahwa :

“Untuk keterampilan berkebun warga binaan kita wajibkan dengan alasan bahwa hasil dari berkebun ini sangat penting bagi warga binaan dimana sayur dan buah yang di dihasilkan akan dikonsumsi untuk para warga binaan. Sedangkan untuk tanaman obat yang di dihasilkan juga di butuhkan oleh warga binaan bahkan kami juga sebagai petugas lapas. Jadi kalau kita butuh sayur kita langsung petik di kebun”.<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di lihat bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan untuk warga binaan yaitu berkebun.

- **Tata Boga**

Pembinaan keterampilan tata boga menjadi salah satu keterampilan yang wajib yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

---

<sup>36</sup> Nurfitriani, warga binaan kasus pembunuhan wawancara pada hari Rabu, 10 April 2019

<sup>37</sup> Ibu Ramlah, Kasubsi Sarana Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

<sup>38</sup> Ibu Nurmiati, Kasie Giatja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

<sup>39</sup> Fransiska, warga binaan wawancara pada hari Rabu, 10 April 2019

<sup>40</sup> Ibu Indah, Kasubsi Bimbingan Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah, selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, bahwa :

“Warga binaan diberikan pengembangan keterampilan tata boga tujuannya selain dari mereka memasak untuk kebutuhan konsumsi sendiri, memanfaatkan dapur yang ada untuk membuat masakan yang baru, membuat kue sehingga menu dan jenis makanannya juga bervariasi”.<sup>41</sup>

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Nurmiati selaku Kasie Giatja, bahwa :

“Memberikan pembekalan keterampilan tata boga dalam hal ini masak-memasak kita memanfaatkan keahlian yang sebelumnya mereka miliki untuk menghasilkan kue misalnya, seperti saat ada kegiatan lapas yang membutuhkan konsumsi jadi kita tidak lagi membeli misalnya kue dari luar, warga binaan yang mengikuti tata boga tinggal membuat sendiri kuenya. Ataukah pada saat bulan ramadhan kita fasilitasi mereka untuk membuat kue kering yang bisa dijual untuk umum”.<sup>42</sup>

Menurut salah satu warga binaan Ramlah, bahwa :

“Kita yang ikut tata boga setiap hari membuat kue yang untuk dimakan oleh warga binaan atau ada pegawai lapas yang meminta untuk di buat kue nanti dibayar oleh pegawai lapas, sehingga kita dapat pemasukan untuk membeli bahan kuenya”.<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di lihat bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan untuk warga binaan yaitu tata boga.

Proses pembinaan yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam bidang keterampilan terdapat lima

jenis kegiatan yakni : menjahit, salon, kerajinan tangan, berkebun, dan tata boga. Pembinaan tersebut intensif dilakukan oleh lapas tujuannya agar warga binaan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Dari observasi lapangan ditemui beberapa hal yang belum berjalan maksimal sehingga perlu dari pihak lapas untuk mencermati hal tersebut sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai, misalkan pembinaan keterampilan menjahit terkadang ketika mesin jahit beroprasi semua sementara ada warga binaan yang tidak kebagian maka hendaknya pendamping keterampilan menjahit tetap mendampingi dengan memberikan teori menjahit. Selain itu pembinaan salon, berkebun, kerajinan tangan dan tata boga perlu perhatian terkait pengelolaan hasil atau *out put* yang diperoleh dalam artian dana yang diperoleh dari pembinaan keterampilan ini betul-betul diperuntukan untuk warga binaan agar kegiatannya tetap berjalan.

#### **b. Pembinaan Jasmani**

Bentuk pembinaan selanjutnya yang diberikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa untuk warga binaannya adalah jasmani adapun bagian dari pembinaan jasmani sebagai berikut:

##### **• Senam Pagi**

Senam pagi merupakan bentuk pembinaan jasmani di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bungawati, selaku Kasubsi Bimaswat, bahwa :

“Kami dari Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa memberikan pembinaan jasmani kepada warga binaannya salah satunya ada senam pagi, tujuannya selain dari aktifitas rutin lain dari warga binaan kita juga harus memastikan bahwa semua warga binaan

<sup>41</sup> Ibu Indah, Kasubsi Bimbingan Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

<sup>42</sup> Ibu Nurmiati, Kasie Giatja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

<sup>43</sup> Ramlah, warga binaan wawancara pada hari Rabu, 10 April 2019

terjaga kebugaran dan kesehatannya melalui senam pagi, bahkan kita sebagai petugas lapas juga sering ikut senam pagi”.<sup>44</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu narapidana wanita ibu Darma, bahwa :

“Kita senam pagi biasa bersama seluruh petugas Lapas, dan instruktur dari kegiatan ini biasanya dari warga binaan atau petugas dan juga instruktur yang dipanggil dari luar, tapi jarang. Kami sebagai warga binaan sangat senang kalau kita senam pagi, kita berkeringat jadi lebih segar untuk beraktifitas. Tetapi biasa juga ada hari-hari tertentu kita tidak senam, karena ada agenda atau jadwal lain dari lapas”<sup>45</sup>

Dari keterangan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan jasmani dengan memberikan senam pagi dilakukan agar narapidana bisa tetap sehat, bugar dan siap untuk beraktifitas serta menjalin keakraban antara warga binaan petugas.

Pembinaan jasmani yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaanya setelah dilakukan observasi maka dapat diketahui bahwa masih perlu untuk ditambah item kegiatannya sehingga bukan hanya senam pagi saja yang dilakukan, misalkan diberi kegiatan olahraga bermain volley, bulutangkis dan olahraga lainnya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga pembinaan jasmani lebih beragam dan memberikan manfaat yang lebih terhadap warga binaan.

### c. Pembinaan Kerohanian

Untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa petugas lapas membentuk beberapa pembinaan kerohanian agar Warga Binaan perempuan bisa lebih mendalami ilmu keagamaan yang di dapat di dalam lapas. Adapun kegiatan untuk

pembinaan kerohanian adalah sebagai berikut :

- **Pesantren Lapas An-nisa**

Pesantren lapas adalah kegiatan yang diperuntukan untuk warga binaan yang b

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Rohani, selaku Kasie Kamtib, bahwa :

“Pembinaan kerohanian yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan ke warga binaan berupa diajarkan menghafal minimal 20 surah pendek, menghafal asmaul husna, fasih membaca Al-Quran semua kegiatan ini dilakukan di Masjid Lapas dan yang mengajar mengaji dilakukan oleh petugas lapas secara bergantian dan juga dibantu oleh warga binaan yang memang sudah paham mengenai bacaan dalam Al-Quran dan pembinaan kerohanian ini”.<sup>46</sup>

Sementara itu menurut salah satu narapidana kasus pembunuhan, Ci’nong Dg. Caya, bahwa :

“Selama saya disini banyak ilmu yang saya dapat seperti bimbingan mengaji serta menghafal Al-Quran, dari yang sebelumnya tidak fasih menjadi fasih, sekarang saya sudah mampu hafal 32 Surah, kalau teman-teman warga binaan lainnya berkat pembinaan ini keimanan mereka bertambah yang sebelumnya mungkin jarang shalat wajib tapi setelah mengikuti kegiatan ini sudah rajin shalat wajib”.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan kita dapat mengetahui bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa betul-betul mengutamakan pembinaan kerohanian dalam hal ini bagi yang beragama Islam, dengan tujuan bagaimana warga binaan lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaanya kepada Allah SWT.

- **Ibadah Kristen**

Pembinaan kerohanian khusus untuk agama Kristen, pihak lapas memfasilitasi warga

<sup>44</sup> Ibu Bungawati, Kasubsi Bimaswat, wawancara pada hari Jum’at, 10 April 2019

<sup>45</sup> Ibu Darma, salah satu warga binaan, wawancara pada hari Sabtu, 11 April 2019

<sup>46</sup> Ibu Sitti Rohani, Kasie Kamtib wawancara pada hari senin, 15 April 2019

<sup>47</sup> Ci’nong Dg. Caya, warga binaan kasus pembunuhan, wawancara pada hari selasa, 16 April 2019

binaanya dalam hal ini ibadah dan lain-lainnya yang berhubungan dengan agama Kristen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanggi selaku Staf Bimaswat, bahwa :

“Untuk pembinaan kerohanian sama halnya yang beragama islam kita juga memfasilitasi warga binaan yang beragama Kristen, jadi mereka memiliki ruang dan waktu untuk beribadah dengan adanya Gereja di dalam lapas. Untuk proses kegiatan ibadahnya sendiri dalam artian pemuka agama Kristen maka kita hadirkan pendeta untuk membimbing warga binaan untuk beribadah setiap hari minggu”.<sup>48</sup>

Sementara menurut salah satu warga binaan kasus pembunuhan, Valencia bahwa ;

“Pihak lapas sangat memperhatikan kami yang beragama Kristen yang mana kita didatangkan pendeta untuk membimbing kami beribadah di Gereja, jadi kami merasa bahwa pihak lapas betul-betul melakukan pembinaan kerohanian semua warga binaan.”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan kita dapat mengetahui bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa betul-betul mengutamakan pembinaan kerohanian dalam hal ini bagi yang beragama kristen, sesuai amanah Undang-undang Dasar dan Pancasila.

Setelah observasi lapangan untuk pembinaan kerohanian yang diberikan pihak Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaanya terdapat dua kegiatan yakni : pesantren lapas dan ibadah kristen. Untuk pembinaan kerohanian ini pihak lapas sangat perlu memberikan perhatian lebih dikarenakan berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki oleh warga binaan, karena semakin baik pembinaan kerohaniannya maka pada saat keluar nanti warga binaan ini akan berorientasi pada perilaku dan tindakan yang baik serta positif.

Jadi untuk keseluruhan pelaksanaan

pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, mulai dari pembinaan keterampilan, pembinaan jasmani dan pembinaan kerohanian untuk kasus pembunuhan proses pembinaan yang diberikan sama dengan kasus-kasus lainnya, tanpa ada perbedaan perlakuan dengan mengutamakan hak warga binaan.

### **3. Hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan.**

Dalam proses pembinaan yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, tidak terlepas dari yang namanya hambatan.

Adapun hambatan-hambatan yang di hadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam melaksanakan proses pembinaan warga binaanya terbagi menjadi dua faktor, yakni sebagai berikut ;

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana dalam sebuah instansi sangat menunjang dalam melaksanakan kerja-kerja dan fungsinya, begitupun dengan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arief Wicaksono selaku Kaur umum menjelaskan bahwa :

“Selama ini dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh lapas yang dirasa menjadi kendala adalah sarana dan prasarana yang dimiliki, karena beberapa proses pembinaan harusnya di tunjang dengan lengkapnya sarana dan prasaran misalnya, fasilitas pengembangan keterampilan tata boga masih terbatas alat pembuatan

---

<sup>48</sup> Bapak Yanggi, Staf Bimaswat wawancara pada hari senin, 15 April 2019

<sup>49</sup> Valencia warga binaan kasus pembunuhan, wawancara pada hari selasa, 16 April 2019

kue yang kita miliki jadi biasa kuenya itu-itu saja. Kalau dari pengembangan keterampilan berkebun misalnya masih terbatas alat dan pupuk untuk perawatan tanaman kebun sehingga ada beberapa tanaman yang biasa tidak bisa tumbuh dengan subur.”<sup>50</sup>

Hal serupa di sampaikan oleh Ibu A. Wardani Irawati, selaku Ka.KPLP, menjelaskan bahwa :

“Yang kami rasakan sebagai hambatan pada proses pembinaan adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, misal untuk keterampilan berkebun warga binaan, lahan yang bisa di sediakan hanya sekitaran kamar warga binaan, padahal seadanya ada lahan yang masih kosong kita bisa memanfaatkan itu untuk berkebun sehingga lebih maksimal hasil yang diperoleh.

Ditambahkan lagi bahwa :

“Untuk pembinaan kerohanian masih kurang buku bacaan tentang agama khususnya agama islam”.<sup>51</sup>

Sementara itu menurut salah satu warga binaan Herawati, mengatakan bahwa :

“Yang saya rasa kurang itu dari sarana dan prasarana adalah alat-alat pembuat kue masih kurang, di salon juga masih butuh untuk ditambah alat pendukung mesin potong rambut, alat-alat make-up juga masih sedikit”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana masih dianggap kurang, sehingga dirasa berpengaruh terhadap proses pembinaan warga binaan.

## 2) SDM Lapas

Sumber daya manusia yang di miliki juga sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan yang ada Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arief Wicaksono selaku Kaur umum menjelaskan bahwa :

“SDM yang kita miliki sebenarnya masih kurang, dalam artian bahwa idealnya dalam melakukan pembinaan perbandingan petugas dengan warga binaan hamper setengah sehingga lebih maksimal dalam mendampingi. Selain itu kemampuan yang dimiliki oleh petugas lapas harus terus ditambah sesuai dengan kebutuhan warga binaan misalnya, proses pendampingan dalam pembinaan kerohanian, kalau bisa semua petugas lapas mampu memberikan bimbingan kerohanian sehingga tidak lagi bergantung pada ustadz yang di datangkan dari luar lapas”.<sup>52</sup>

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu A. Wardani Irawati, selaku Ka.KPLP, bahwa :

“Kita masih perlu penambahan pegawai lapas sekalipun dianggap sudah banyak tetapi dalam mengefektifkan pendampingan terhadap warga binaan lebih bagusnya ditambah, juga untuk pegawai harus mampu menyesuaikan diri dalam hal ini meningkatkan skill untuk mendampingi, contohnya petugas yang mendampingi warga binaan untuk keterampilan harus menguasai bidang keterampilan tersebut sehingga betul-

---

<sup>50</sup> Arief Wicaksono, Kaur Umum wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

<sup>51</sup> A. Wardani Irawati, Ka.KPLP Wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

<sup>52</sup> Arief Wicaksono, Kaur Umum wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019



betul menambah ilmu dari warga binaan yang di dampingi”.<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat ketahui jika Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa menganggap SDM yang di miliki masih dianggap kurang.

### **3) Warga Binaan itu sendiri**

Pribadi warga binaan juga menjadi hambatan dalam proses pembinaan karena mereka yang berangkat dari berbagai watak dan kasus yang telah dilakukan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arief Wicaksono selaku Kaur umum menjelaskan bahwa :

“Warga binaan itu sendiri juga menjadi kendala dalam melakukan pembinaan karena kadang ada beberapa warga binaan masih malas mengikuti kegiatan pengembangan keterampilan, kerohanian dan jasmani padahal sudah disampaikan bahwa itu diwajibkan bagi setiap warga binaan, tetapi ada saja yang malas-malasan, misalnya pembinaan kerohanian, masih ada yang malas ke masjid untuk ikut kegiatan dengan berbagai alasan, maka kita sebagai petugas memberikan sedikit paksaan”.<sup>54</sup>

Sementara itu menurut Arisandi selaku Staf Bimaswat mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan hambatan yang dialami itu juga berasal dari diri warga binaan itu sendiri, terkadang ada sulit untuk diarahkan, tetapi biasanya itu warga binaan yang baru, mungki baru menyesuaikan diri, sehingga butuh perhatian ekstra untuk di bina, dan itu

sudah tugas kami sebagai petugas lapas”.<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu warga binaan kasus pembunuhan, menyatakan bahwa :

“Saya terkadang tidak mengikuti pembinaan kerohanian yaitu yasinan karena capek seharian mengikuti berbagai kegiatan pembinaan lain yaitu keterampilan, jadi untuk malam hari biasa saya manfaatkan untuk beristirahat, supaya besok aktif lagi mengikuti kegiatan lainnya”.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat di mengerti kalau warga binaan itu sendiri juga menjadi hambatan dalam proses pembinaan, terkadang ada yang malas-malasan untuk mengikuti proses pembinaan.

### **b. Faktor Eksternal**

Dalam pembinaan warga binaan hambatan eksternal yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. Hal ini di jelaskan oleh Ari Perdana selaku Staf Bimaswat, sebagai berikut:

“ Kendala dari luar di lapas yang di keluhkan dari keluarga-keluarga warga binaan merasa lapas ini jauh, jauh dari keramaian, Itu juga yang menjadi keluhan dari pihak yang biasa bekerjasama dengan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, seperti ustadz yang sering mendampingi warga binaan, karena letak lapas yang cukup jauh biasa menjadi pertimbangan sehingga kunjunganya tidak sesuai jadwal”<sup>57</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa bagi keluarga dan pihak lain dari luar lapa

---

<sup>53</sup> A. Wardani Irawati, Ka.KPLP Wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

<sup>54</sup> Arief Wicaksono, Kaur Umum wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

<sup>55</sup> Arisandi, Staf Bimaswat, wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

<sup>56</sup> Ami Suratmi warga binaan kasus pembunuhan, wawancara pada hari Selasa, 16 April 2019

<sup>57</sup> Ari Perdana, Staf Bimaswat, wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

mengeluhkan jarak yang Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa yang jauh sehingga agak susah untuk diakses.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.**

Dalam sistem pemasyarakatan mengarahkan kegiatan pembinaan keagamaan agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak lagi menggulangi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan pemasyarakatan sebagai Warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah melakukan pembinaan sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999. Itu dapat dibuktikan dengan adanya proses pembinaan keterampilan, kerohanian dan jasmani, dengan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya.

Dengan demikian, narapidana mendapatkan pembinaan yang menyangkut spiritual (cerdas), moral (beriman dan bertaqwa), intelektual (terampil), fisik (sehat), dan sosial

(bertanggung jawab), sehingga terwujud kepribadian yang utama yaitu sehat fisik dan psikis dalam arti senantiasa melaksanakan perbuatan yang bernilai ibadah.

Terkait untuk pembinaan warga binaan kasus pembunuhan yang ada di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, proses pembinaan yang di berikan sama dengan semua warga binaan dari kasus apapun, jadi tidak ada perlakuan khusus untuk kasus tertentu, karena dalam proses pembinaan semua warga binaan di perlakukan sama.

### **2. Hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan.**

Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam melakukan pembinaan betul tidak terlepas dari yang namanya hambatan sehingga dalam penelitian di lakukan diperoleh hal-hal yang dianggap menjadi hambatan dan dibagi menjadi faktor internal dan eksternal.

Dari segi internal beberapa hal yang dianggap menjadi hambatan untuk mewujudkan proses pembinaan warga binaan kasus pembunuhan yaitu :

- a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam menunjang proses pembinaan perlu untuk di tambah atau di lengkapi sehingga lebih memaksimalkan proses pembinaanya.
- b. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa juga perlu untuk ditambah dan kemampuan dari petugas lapas dalam memberikan bimbingan juga perlu ditingkatkan karena sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan terhadap warga binaan.
- c. Warga binaan itu sendiri juga menjadi hambatan dalam proses pembinaan, jadi betul-betul perlu ada kesadaran diri dari warga binaan untuk mengikuti semua proses yang ada di

lapas sehingga kelak nanti setelah selesai menjalani masa hukumannya, dapat diterima dengan baik di lingkungan dan masyarakat.

Jadi diperoleh bahwa hambatan internal yang dialami Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa alam mewujudkan proses pembinaan warga binaan kasus pembunuhan adalah Sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan warga binaan itu sendiri.

Sedangkan hambatan eksternal yang di alami oleh Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam proses pembinaan warga binaan kasus pembunuhan adalah letak Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa yang di rasa pihak luar cukup jauh baik di keluhkan oleh keluarga warga binaan, maupun pihak luar lainnya yang bekerjasama dengan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam setiap kegiatannya.

Jadi untuk hambatan eksternal Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam proses pembinaan warga binaan kasus pembunuhan hanya letak lapas yang jauh dari keramaian dan jauh di jangkau.

Jadi untuk hambatan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan itu secara keseluruhan dalam artian hambatan yang ada bukan hanya untuk kasus pembunuhan tetapi 66 kasus yang di lakukan warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Keefektifan Pembinaan Warga

Binaan Kasus Pembunuhan Di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa , maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu : (1) Pembinaan keterampilan yang terdiri dari; Menjahit, salon, kerajinan tangan, berkebun, dan tata boga. (2) Pembinaan kerohanian yaitu Pesantren An-nisa. (3) Pembinaan jasmani yaitu senam pagi. Untuk pelaksanaannya dapat dikatakan sudah optimal namun tidak terlepas dari beberapa hal yang menghambat proses pelaksanaan pembinaan tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam proses pembinaan warga binaan kasus pembunuhan terbagi dua yaitu : (1) Hambatan Internal yang terdiri dari sarana dan prasarana yang perlu di tambah, sumber daya manusia yang perlu ditambah jumlahnya dan ditingkatkan kemampuannya, dan warga binaan itu sendiri yang perlu ditingkatkan kesadarannya. (2) Hambatan eksternal yakni letak Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa yang di rasa pihak luar cukup jauh baik di keluhkan oleh keluarga warga binaan, maupun pihak luar lainnya yang bekerjasama dengan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam setiap kegiatannya.

### **B. SARAN**

Adapun saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa untuk lebih mengefektifkan proses pembinaan warga binaan kasus pembunuhan dan juga kasus-kasus lainnya.
2. Kepada pegawai dan petugas lapas tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini proses pembinaan terhadap warga binaan baik kasus

- pembunuhan maupun kasus-kasus lainnya.
3. Kepada warga binaan agar tetap taat pada peraturan lapas, khususnya Lapas Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa karena apa yang di lakukan oleh pihak lapas semata-mata untuk menegakkan hukum di Negara kita dan tidak akan pernah bertentangan dengan aturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Disman Samosir, 1992. *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia* Cetakan ke- 1, Bandung.
- Diah Gustiani.,Rini Fathonah & Dona Raisa, 2013 *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi Dan PeraturanPerundang – Undangan Fakultas hukum Universitas Lampung.
- Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Bandung:Refika aditama
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003).
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muh. Chaerul R, 2014. *Keefektifan Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Bolangi Sungguminasa*.

Nashriana, 2012, *Perlindungan hukum pidana di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pedoman Penulisan Skripsi, 2015 *Pedoman Penulisan Skripsi FIS UNM*, CV Berkah Utami

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Renggong Ruslan, 2014, *hukum acara pidana (memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)* edisi revisi, Jakarta: Kencana

Samosir Djisman, 1992, *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Binacipta

Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja* (Cet. Ketiga; Bandung: Mandar Maju, 2009).

### Internet :

- [https://id.wikipedia.org/wiki/warga binaan pemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/warga_binaan_pemasyarakatan) diakses pada 16 Januari 2019, ( 08.00 Wita).
- <http://lapas-ciamis.blogspot.co.id/> diakses pada 16 Januari 2019, (12.24 Wita).

### Undang-undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

